

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI
SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Herlina Rahmayanti

20150610439

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Adminitrasi Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

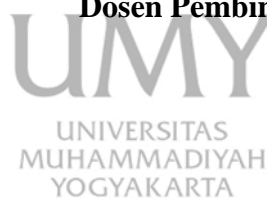
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN ASLI DAERAH DARI

SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

**Disusun Oleh:
Herlina Rahmayanti
20150610439**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal
19 oktober 2019**

Dosen Pembimbing



**Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D
NIK 19721228200004153046**

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr Trisno Raharjo.,SH.,M.Hum
NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herlina Rahmayanti
Nim : 20150610439
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum administrasi Negara
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exklusif Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN, beserta perangkat yang ada dengan bebas royalti Nonexklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan , mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data (*database*),merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 19 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Herlina Rahmayanti
20150610439

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN SLEMAN**

Herlina Rahmayanti dan Sunarno

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Jalan. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Yogyakarta 55183

herlinarahmayanti1@gmail.com; narno_muh@yahoo.com

Abstrak

Keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD dari sektor pariwisata dan faktor apa saja yang menghambat dalam peningkatan pariwisata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan hukum normatif, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan PAD dari sektor pariwisata adalah Dinas Pariwisata sebagai pelaksana di bidang pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pariwisata di setiap destinasi wisata, selain itu juga meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola. Selanjutnya, faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam peningkatan pendapat asli daerah dari sektor pariwisata adalah terbatasnya sumber daya manusia baik dilingkungan Dinas Pariwisata maupun di lingkungan desa wisata sehingga belum maksimalnya pengembangan desa wisata. Dinas Pariwisata diharapkan lebih fokus pada pengembangan nilai budaya dan seni tradisi di setiap tempat wisata sebagai daya tarik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: *Faktor Penghambat, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pariwisata.*

I. Pendahuluan

Peranan PAD harus ditingkatkan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.¹

Tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah semakin besar dengan semakin banyaknya pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan lebih kreatif untuk menggali secara maksimal sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya karena hal ini sangat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas dan keleluasan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Visi ekonomi dari otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah diharuskan mampu menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.²

Salah satu daerah yang saat ini sedang memaksimalkan pendapatan asli daerah adalah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah Pembangunan di Kabupaten Sleman selain untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman. Dalam

¹ Nafsi Hartoyo, Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

² Agus, Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 398.

melaksanakan pembangunan daerah Kepala Daerah memiliki visi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam misi. Visi yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency* pada tahun 2021”. Hal ini juga merupakan implementasi dengan diberlakukannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³

Efektifitas pembangunan di Kabupaten Sleman tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi.⁴

Belanja pemerintah yang tinggi ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri. Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah.⁵

³ Arief Hartanto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Upaya Memperkuat Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sleman, <https://www.kompasiana.com/arief-hartanto/5833c32e537a616007a8867f/pendapatan-asli-daerah-pad-dan-upaya-memperkuat-kemandirian-ekonomi-kabupaten-sleman?page=all>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar Rp. 867.643.469.527,46,-. Dari pendapatan tersebut, sektor pariwisata Kabupaten Sleman mendulang pemasukan Rp205,6 Miliar. Pendapatan besar ini adalah efek dari tingginya arus wisatawan. Sleman juga sukses mengeksplorasi beberapa event. Jumlah Rp205,6 Miliar itu, menempati porsi 23% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Sleman. Sektor pariwisata membukukan kontribusi hingga 23%. Angka ini menjadi bukti keberhasilan beberapa kebijakan pariwisata yang diterapkan di Sleman.⁶

Berkembangnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sleman didukung dengan adanya berbagai objek dan daya tarik wisata. Adapun daya tarik wisata di Kabupaten Sleman di antaranya wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata agro, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata kuliner dan wisata sejarah. Disamping itu, keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di kabupaten sleman dan faktor penghambanya.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapat asli daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Sleman ?

III. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dan hukum normatif, artinya

⁶ Cholis Faizi Sobari, Sleman Dulang Rp205,6 Miliar dari Pariwisata, <https://www.genpi.co/berita/4733/sleman-dulang-rp2056-miliar-dari-pariwisata>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada. Sedangkan hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris, karena menggunakan kata kunci yaitu implementasi yang mengharuskan terjun langsung ke lapangan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi dengan menyuguhkan data dengan situasi yang terjadi.

C. Objek penelitian

Pemerintahan Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian.

D. Subjek penelitian

- a. Kepala Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Sleman.

F. Sumber data penelitian

1. Data primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara⁷

2. Data sekunder

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan memikat secara yuridis sebagai pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur- literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal , internet serta media lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Dengan melakukan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.

2. Metode Kepustakaan

Penelitian dalam membaca, mempelajari buku-buku referensi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dengan:

- a. Wulan Wahyuningsih, S.E., M.M, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman;
- b. Tin Ibriz Fana, S.E.m M.Ev. Dev, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang akan diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang ditelitidisebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder.⁸

5. Dokumentasi

⁸ *Ibid*, hlm. 175.

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan.

H. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, desain penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan tapi tetap longgar dan terbuka terhadap teori. Menata atau mengorganisasikan data yang banyak dari hasil pengumpulan dengan rapi, sistimatis, dan selengkap mungkin.⁹

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu daerah yang memiliki komitmen penuh dengan sektor pariwisata. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebesar Rp. 867. 643.469.527,46,-.¹⁰ Dari pendapatan tersebut, sektor pariwisata Kabupaten Sleman mendulang pemasukan Rp205,6 Miliar. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Selain itu pendapatan juga diperoleh dari pajak hotel dn restoran.

Jumlah Rp 205,6 Miliar itu, menempati porsi 23% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Sleman. Sektor pariwisata membukukan kontribusi hingga 23%. Angka ini menjadi bukti keberhasilan beberapa kebijakan pariwisata

⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.134.

¹⁰ Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

yang diterapkan di Sleman.¹¹

Untuk pendapatan yang berasal dari tempat wisata, Dinas Pariwisata berhasil mendapatkan Rp. 7.549.148.204,- yang berasal dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan tersebut penulis jabarkan dalam tabel dibawah ini:

No	Uraian	Target Setelah perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	6.154.500.000,-	6.477.334.800,-	105,25
	Retribusi Jasa Usaha	6.154.500.000,-	6.477.334.800,-	105,25
	Retribusi Pemakaian Kakayaan Daerah	77.000.000,-	99.511.800,-	129,24
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.077.500.000,-	6.377.823.000,-	104,94
2	Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	980.000.000,-	1.071.813.404,-	109,37
	Pendapatan Dari Pengembalian	980.000.000,-	1.071.813.404,-	109,37
	Pendapatan Dari Pengembalian Bagi Hasil Ratu Boko	900.000.000,-	954.447.704,-	106,49
	Pendapatan Dari Pengembalian Bagi Hasil Taman Lampion	80.000.000,-	113.365.700,-	141,71

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2018 (di luar pajak hotel dan pajak restoran)

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah untuk tiap bulannya dirinci sebagai berikut:

No	Bulan	Pendapatan Asli Daerah	%
1	Januari	Rp. 1.055.799.230	1,84
2	Februari	Rp. 1.723.630.429	3,01
3	Maret	Rp. 7.301.185.462	12,77
4	April	Rp. 2.946.125.110	5,15
5	Mei	Rp. 3.369.907.598	5,89
6	Juni	Rp. 3.970.609.048	6,94
7	Juli	Rp. 4.732.369.053	8,27
8	Agustus	Rp. 5.272.645.634	9,22
9	September	Rp. 5.815.012.422	10,17
10	Oktober	Rp. 6.400.666.041	11,19
11	November	Rp. 6.923.005.129	12,11

¹¹ Cholis Faizi Sobari, Sleman Dulang Rp205,6 Miliar dari Pariwisata, <https://www.genpi.co/berita/4733/sleman-dulang-rp2056-miliar-dari-pariwisata>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

12	Desember	Rp. 7.648.660.004	13,38
13	Jumlah	Rp. 57.159.615.160	99,94

Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Dinas Pariwisata Tahun 2018

Berkembangnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan di Kabupaten Sleman didukung dengan adanya berbagai objek dan daya tarik wisata. Adapun daya tarik wisata di Kabupaten Sleman di antaranya wisata alam, wisata candi, wisata museum, wisata agro, wisata pendidikan, wisata monumen, wisata kuliner dan wisata sejarah. Disamping itu, keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten.

Ibu wulan menyampaikan¹² banyaknya objek wisata di Kabupaten Sleman menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang PAD di Kabupaten Sleman. Untuk itu Dinas Pariwisata terus melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman terus ditingkatkan karena semakin tinggi wisatawan yang datang maka semakin besar pemasukan dari sektor pariwisata dalam menyumbang PAD.

Oleh karena itu besarnya pemasukan dari sektor pariwisata menjadikan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya yang dianggap mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengawasan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Sleman.

Efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah lembaga publik maupun kelembagaan privat sangat membutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah

¹² Wawancara dengan Ibu Wulan Wahyuningsih, S.E., M.M, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, pada tanggal 7 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

ditetapkan sebelumnya. Pengawasan itu sendiri adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga organisasi yang bersangkutan.¹³

Pengawasan itu sangat penting, karena merupakan salah satu usaha untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan keserasian antara penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah-daerah dengan Pemerintah, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam suatu ikatan negara kesatuan. Pengawasan atas kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan sifatnya yang dikenal antara lain pengawasan terhadap perda. Dalam hal ini perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai

¹³ Makmur, *Efektifitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Hal. 176.

aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar daerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Sleman terhadap pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara antara lain: kunjungan lapangan, rapat kerja dengan SKPD dan Dinas-Dinas Pemerintahan kabupaten Sleman dan melakukan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Kunjungan lapangan yang dilakukan biasanya menghadiri *event-event* pariwisata yang diadakan di tempat-tempat wisa. Dari kunjungan lapangan ini, Bupati dapat melihat kondisi tempat wisata dan juga dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat disekitar tempat wisata.

Rapat kerja/ *hearing* dengan SKPD dan Dinas-Dinas Pemerintahan kabupaten Sleman dilakukan untuk mendapatkan laporan hasil pelaksanaan program-program dari setiap dinas. Dari raat kerja ini juga dapat mengetahui progres dari program yang dijalankan, selain itu juga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, sehingga dapat mencari solusi bersama. Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan Bupati ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka Bupati memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Peran media masa dan masyarakat sebagai alat bantu pengawasan Pemerintah Daerah. Apabila terdapat laporan-laporan dan atau masukan-masukan dari masyarakat, maka Bupati akan melakukan pemanggilan kepada Dinas terkait, selain itu juga ada rapat kerja dengan dinas pendapatan. Kenyataan dilapangan ada beberapa unit kerja yang tidak mampu melaksanakan kegiatan baik disebabkan kesalahan

dalam perencanaan ataupun tidak tepatnya manajemen yang diterapkan, akibatnya Kepala Daerah memutasikan pimpinan unit kerja dan menempatkan pimpinan unit kerja yang lebih profesional.

Pengawasan yang dilakukan pada intinya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan daerah secara umum, sehingga program-program daerah dapat telaksana dengan baik. Sama halnya untuk sektor pariwisata pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah program yang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 telah berjalan dengan baik atau belum dan mencari solusi atau memberikan rekomendasi agar pelaksanaan peraturan daerah ini berjalan dapat dengan maksimal.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas destinasi pariwisata adalah dengan melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait pengelolaan destinasi wisata.

Kunjungan ini tidak lepas dari keterlibatan Kabupaten Sleman dalam *Sustainable Tourism Development* bersama dengan Universitas Gadjah Mada. Dari kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar, banyak informasi yang dapat diperoleh untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman, utamanya dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendukung usaha pariwisata di Kabupaten Sleman, bertempat di Embung Kaliaji, Desa Wisata Sangurejo, Wonokerto, Turi dilaksanakan Perkemahan Bakti Saka Pariwisata Cabang

Sleman mulai tanggal 19-21 April 2018. Acara pertika ini meliputi beberapa kegiatan seperti pemberian materi dan praktek jurnalistik, bincang desa wisata, materi pengenalan krida, makteri utama saka pariwisata, pentas seni , nonton bareng, berbagai lomba dan *launching* taman bermain di Desa Wisata Sangurejo.

Dari kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan semua pihak baik Dinas pariwisata maupun masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mensukseskan pariwisata di Kabupaten Sleman melalui berbagai inovasi kegiatan yang nyata dalam rangka menjaga nilai budaya dan seni tradisi yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan norma yang berkembang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman yang juga akan berpegaruh pada meningkatnya PAD Kabupaten Sleman dari sektor pariwisata.

Wilayah Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memiliki magnet wisata yang patut dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata andalan kabupaten Sleman berada di ujung utara yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah yaitu Taman Nasional Gunung Merapi, Kaliurang, kawasan wisata Kaliadem, *the lost world castle*, *jeep lava tour*, Bunker Kaliadem dan masih banyak lainnya. Di sisi lain wisata edukasi sejarah pun juga ada seperti museum gunung merapi, museum ulen sentalu, wisata edukasi omah salak.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan kunjungan wisatawan manca negara maupun wisatawan dalam negeri dapat menembus angka 10 juta pengunjung, naik dua juta pengunjung di banding tahun 2018. Dengan meningkatnya target wisatawan yang datang ke Kabupaten Sleman, maka pendapatan dari sektor pariwisata juga akan meningkat.

Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi objek wisata yang dapat dijadikan

sebagai destinasi tujuan wisata. Potensi ini meliputi wisata alam, sejarah, museum, budaya, peninggalan purba kala, kuliner dan desa wisata. Wisata daerah kabupaten Sleman jumlahnya cukup banyak dan menarik dikunjungi oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Data Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sleman

No	Uraian Data	2014	2015	2016	2017	2018
	Obyek dan Daya Tarik Wisata	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Wisata Alam	4	4	4	4	4
2	Wisata Budaya	10	10	10	10	10
3	Wisata Agro	4	4	4	4	4
4	Desa Wisata	38	38	39	31	36
5	Wisata Pendidikan	5	5	5	5	5
6	Wisata Museum	10	13	13	14	14
7	Wisarta Moumen	2	2	2	2	2
8	Wisata Candi	12	12	12	12	12
9	Wisata Sejarah	11	11	11	11	11

Untuk dapat merealisasikan target tersebut, Dinas Pariwisata makin giat untuk mengembangkan desa wisata hal ini dikarenakan munculnya sejumlah destinasi wisata baru menjadi salah satu penyebab perbaikan penerimaan. Desa wisata merupakan salah satu program desa yang dimaksudkan untuk menarik wisatawan dating dan mengunjungi desa tersebut. Kedatangan wisatawan diharapkan akan menambah pendapatan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa wisata tersebut.¹⁴

Aspek produk wisata, pengembangan Desa Wisata harus menekankan prinsip-prinsip pengembangan produk sebagai berikut:¹⁵

- a. Keaslian (*Authenticity*) ; Pola perjalanan wisata alternatif membawa wisatawan mencari pengalaman yang terkait dengan “*Authenticity expereince*” atau pengalaman yang asli atau otentik. Pengalaman yang otentik ini didapatkan dari

¹⁴ Mustofa Ahda, Pengembangan Desa Wisata Banguncipto, Jurnal Pemberdayaan, Vol.1, No. 1, Juli 2017, hlm. 90.

¹⁵ Ade Zaena Mutaqin, Pengembangan Desa Wisata dan Pembangyn Pariwisata Berkelanjutan, <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 21.00 WIB.

warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan secara turun menurun oleh suatu masyarakat di suatu destinasi. Dalam hal pengembangan Desa Wisata, yang termasuk dalam hal-hal yang sifatnya otentik diantaranya adalah menjaga tradisi kelokalan, sikap atau kegiatan sehari-hari, nilai-nilai budaya serta fitur alam yang unik dari suatu desa.

- b. Tradisi Masyarakat Setempat (*Local Tradition*); Desa Wisata menyiratkan makna tradisi masyarakat setempat yang kuat. Tradisi merupakan sesuatu yang berakar dan melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu daerah yang menjadi ciri atau karakter budaya yang dipelihara dari waktu ke waktu. Tradisi harus tetap dijaga dan dilestarikan karena selain untuk menjaga identitas dari suatu masyarakat, tradisi yang kuat juga akan menjadi perhatian dan daya tarik sendiri bagi wisatawan. Dalam hal ini Desa Wisata, tradisi masyarakat ini dapat berupa suatu kearifan lokal (*Local Wisdom*), adat istiadat, kesenian musik maupun seni tari, pakaian adat serta makanan khas dari suatu Desa Wisata.
- c. Sikap dan Nilai (*Attitudes and Values*), Sikap dan nilai suatu kebudayaan perlu ditunjang tinggi terutama oleh masyarakat setempat untuk menghindari degradasi nilai akibat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari kunjungan wisatawan. Apabila wisatawan menghargai sikap dan nilai warisan budaya serta pola kehidupan suatu masyarakat, maka masyarakat tersebut akan memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap warisan budayanya, dimana hal ini akan membuat masyarakat menjaga, mempertahankan, dan melestarikan warisan budaya mereka. Desa Wisata yang memiliki masyarakat dengan sikap dan nilai-nilai yang baik akan membuat citra yang baik pula bagi Desa Wisata tersebut. Sikap dan nilai yang baik dapat ditunjukkan dengan perilaku yang baik, ramah terhadap wisatawan, dan tegas terhadap aturan-aturan yang dipegang.
- d. Konservasi dan daya dukung (*Conservation dan Carrying Capacity*), Pengembangan Desa Wisata harus menerapkan prinsip-prinsip pelestarian serta dalam hal pemampaatnya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini penting agar dengan berjalannya pembangunan pariwisata, kapasitas maksimum daya dukung (*Carrying Capacity*) dari suatu destinasi dalam menyokong kebutuhan berbagai pemamfaatan tidak akan merusak alam, budaya maupun lingkungan. Dalam pengelolaan Desa Wisata, upaya konservasi dapat dilakukan dalam pengaturan pola kunjungan, zonasi kawasan serta penetapan daya dukung fisik (lingkungan) dan non fisik (budaya dan masyarakat)

Pengembangan Desa Wisata harus didukung dengan Sumber daya Manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep Desa Wisata, bekerja dengan jujur, totalitas serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kewajibannya. Sumber Daya Manusia pengelola kegiatan Desa Wisata harus memiliki kemampuan penguasaan berbagai unsur lokalitas desa sebagai kekuatan daya tarik utama.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Pengembangan Desa Wisata perlu didukung dengan manajemen atau pengelolaan dengan kelembagaan yang solid, fleksibel dan sederhana serta dinamis. Kelembagaan pengelolaan Desa Wisata seharusnya bersifat mandiri, melibatkan tokoh Desa dan masyarakat setempat serta berbasis pada asas manfaat bukan asas keuntungan, keterlibatan masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam pengelolaan Desa Wisata ini untuk mengambil bagian aktif dalam semua proses, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, termasuk didalamnya pengusahaan kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan dari Desa Wisata dengan demikian masyarakat akan tumbuh rasa memiliki terhadap perkembangan pariwisata di desanya, sebagai pengelola sekaligus penerima manfaat.¹⁷

Jumlah desa wisata di kabupaten Sleman sesuai data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2018 tercatat sebanyak 47 desa wisata. Desa wisata merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan sektor pariwisata yang menyajikan pelayanan dan fasilitas yang dapat dinikmati oleh wisatawan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Ibu Wulan menyampaikan terkait desa wisata, Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang pariwisata. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mempunyai peran penting dalam mengembangkan desa wisata di daerahnya yang nantinya akan terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan suatu daerah sebagai kabupaten yang bertumpu pada kekayaan alam dan keragaman budaya yang melekat pada Kabupaten Sleman dengan mengoptimalkan keunggulan lokal termasuk pemberdayaan masyarakat lokal.

¹⁷ *Ibid.*

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman juga merupakan penyedia fasilitas berupa sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata, dan penunjang kenyamanan dalam melayani wisatawan. Hal ini dikarenakan fasilitas juga dapat menjadi daya tarik sendiri untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dinas Pariwisata menyediakan fasilitas untuk wisatawan dan pengelola desa wisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memiliki *website* sendiri sebagai informasi kepada publik dan dapat berperan sebagai media promosi bagi Desa Wisata.

Keberadaan pengembangan desa wisata diharapkan dapat menambah kualitas dan kuantitas keberagaman produk atau diversifikasikan produk. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik yang sudah pernah maupun yang belum pernah berkunjung, fenomena ini juga akan berdampak pada pendapatan daerah.

Dalam mengembangkan Desa Wisata, Dinas Pariwisata memiliki program peningkatan sarana dan prasarana desa wisata. Program tersebut memiliki kegiatan yaitu pendampingan desa wisata. Pendampingan desa wisata dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola desa wisata dan masyarakat. Pendampingan juga bertujuan untuk memberdayakan pengelola desa wisata dan masyarakat.

Pelatihan pemandu wisata merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan program dari kegiatan pelatihan pemandu wisata tersebut yaitu pembinaan pemandu wisata. Pelatihan dari pemandu wisata berguna untuk meningkatkan ketrampilan, dan meningkatkan pelayanan bagi pengurus desa wisata dalam melayani wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pendampingan dan pelatihan untuk bisa melayani wisatawan lebih baik lagi

sehingga wisatawan merasa nyaman dan betah yang akan meningkatkan lama berkunjung wisatawan. Selain program pengembangan budaya dan peran serta masyarakat, pihak Dinas Pariwisata juga memastikan fasilitas umum. Fasilitas yang dibenahi antara lain toilet, mushola, area parkir, dan sebagainya agar layak digunakan oleh wisatawan.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2018, Dinas Pariwisata Klasifikasi Desa Wisata Sleman mengklasifikasikan Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Kategori Tumbuh, sebanyak 14 Desa Wisata;
- b. Kategori Berkembang, sebanyak 11 Desa Wisata;
- c. Kategori Mandiri, sebanyak 11 Desa Wisata;
- d. Kategori Rintisan, sebanyak 11 Desa Wisata.

Dari hasil klasifikasi, perkembangan desa wisata di Kabupaten Sleman tidak banyak berubah, dalam artian tidak banyak desa wisata yang statusnya meningkat ke kategori selanjutnya. Selain itu juga terdapat desa wisata yang awalnya berada dalam kategori mandiri malah turun ke kategori berkembang

Diketahui juga bahwa terdapat beberapa desa wisata yang tidak aktif dan tidak ada manajemen pengelolaan bahkan ada desa wisata yang menyatakan diri bubar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman untum memberikan pendampingan secara intensif dan/atau memberi perhatian lebih bagi desa wisata.

Lambatnya pengembangan desa wisata sebagai destinasi wisata baru, bahkan terdapat desa wisata yang tidak aktif merupakan hambatan bagi dinas pariwisata untuk lebih meningkatkan pendapatan. Ibu Wulan menyampaikan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada, baik di lingkungan Dinas Pariwisata maupun di lingkungan desa wisata yang akan

dikembangkan.

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pariwisata menyebabkan pengawasan oleh Dinas Pariwisata masih terbatas. Dinas Pariwisata tidak mampu untuk terus melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata tidak tersalurkan ke Dinas Pariwisata dengan cepat, dengan demikian dinas pariwisata tidak dapat segera memberikan solusi maupun tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan desa wisata juga merupakan faktor penghambat bagi perkembangan desa wisata. Masyarakat warga di sekitar desa wisata telah memiliki pekerjaan, sehingga sangat sulit untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep Desa Wisata, totalitas serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kewajibannya.

Disampaikan oleh Ibu Wulan, program pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata tidak dapat berjalan maksimal karena sumber daya manusia untuk mengurus desa wisata masih sangat sedikit, dan kebanyakan pengurus desa wisata juga disibukkan dengan pekerjaan lain, sehingga tidak dapat fokus pada pengembangan dan pengurusan desa wisata. Dengan demikian, tujuan dari program Dinas Pariwisata untuk membentuk desa wisata dengan manajemen atau pengelolaan dengan kelembagaan yang solid, fleksibel dan sederhana serta dinamis masih sulit untuk dilaksanakan.

Lambatnya perkembangan desa wisata di Kabupaten Sleman menurut Dinas Pariwisata juga berdampak pada perekonomian masyarakat bahkan juga berdampak ke pendapatan daerah, karena sejatinya tujuan dari pengembangan desa wisata adalah

bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru, membuka peluang usaha yang pada akhirnya akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapat asli daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan pengawasan seperti kunjungan lapangan, rapat kerja dengan SKPD dan Dinas-Dinas Pemerintahan kabupaten Sleman dan melakukan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Selanjutnya Dinas Pariwisata sebagai pelaksana di bidang pariwisata melakukan beberapa upaya seperti melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata Kota Denpasar untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait pengelolaan destinasi wisata. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendukung usaha pariwisata di Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata mengadakan pelatihan dan kegiatan seperti pemberian materi dan praktek jurnalistik. Faktor yang menghambat pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapat asli daerah dari sektor pariwisata Kabupaten Sleman adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang ada, baik di lingkungan Dinas Pariwisata untuk melakukan pengawasan maupun di lingkungan desa wisata yang akan dikembangkan yang sangat sulit untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memahami dan mengerti prinsip-prinsip dan konsep Desa Wisata, totalitas serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kewajibannya.

B. Saran

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata sebaiknya lebih fokus pada pengembangan nilai budaya dan seni tradisi di setiap tempat wisata sebagai daya tarik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman.

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam meembangkan Desa Wisata sebaiknya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola desa wisata yang sedang dikembangkan baik dari segi fasilitas maupun promosi agar dapat berkembang lebih cepat dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik* : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta, 2009.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal

Mustofa Ahda, Pengembangan Desa Wisata Banguncipto, *Jurnal Pemberdayaan*, Vol.1, No. 1, Juli 2017,

Internet

Arief Hartanto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Upaya Memperkuat Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sleman, <https://www.kompasiana.com/arief-hartanto/5833c32e537a616007a8867f/pendapatan-asli-daerah-pad-dan-upaya-memperkuat-kemandirian-ekonomi-kabupaten-sleman?page=all>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

Ade Zaena Mutaqin, Pengembangan Desa Wisata dan Pembangyn Pariwisata Berkelanjutan, <https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desa-wisata>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2019, pukul 21.00 WIB

Cholis Faizi Sobari, Sleman Dulang Rp205,6 Miliar dari Pariwisata, <https://www.genpi.co/berita/4733/sleman-dulang-rp2056-miliar-dari-pariwisata>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

Nafsi Hartoyo, Optimalisasi PAD untuk Peningkatan Kinerja Pemda, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/19684-optimalisasi-pad-untuk-peningkatan-kinerja-pemda>, diakses pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 23.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Biodata Penulis

Penulis pertama

Nama : Herlina Rahmayanti
Tempat tgl lahir : Banjarmasin, 15 Juni 1997
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pramuka komplek Pdam no.45 rt.09
Email : Herlinarahmayanti1@gmail.com
Pendidikan terakhir : SMA

Penulis Kedua

Nama lengkap : Sunarno.SH.,M.Hum.,Ph.D
Tempat tgl Lahir : Sleman, 28 Desember 1972
Agama : Islam
Alamat : Jodag, Sumberadi, Mlati, Sleman
Pendidikan : S1 Universitas Gadjah Mada
S2 Universitas Gadjah Mada
S3 Universiti Islamic Malaysia